HARIAN RAKJAT: ALAT PROPAGANDA PARTAI KOMUNIS INDONESIA 1959-1965

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah

Disusun oleh:

Akbar Ridwan
NIM. 13030114140084

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Akbar Ridwan, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 1 Februari 2019

Penulis,

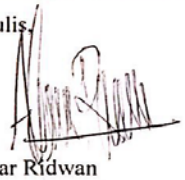

Akbar Ridwan
NIM 13030114140084

ii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.”

- Pramoedya Ananta Toer

“*Hij kon niet zonder lijden leed zien*.” (Dia tidak bisa melihat penderitaan tanpa mengalami penderitaan itu sendiri)

- Multatuli

Dipersembahkan untuk:
Kedua orang tua, abang, adik, dan
mereka yang berkorban dan menjadi
korban sejarah

Disetujui,

Dosen Pembimbing,

Drs. Sugiyarto, M.Hum.
NIP 19550807 198903 1 002

iv

Skripsi dengan judul "*Harian Rakjat*: Alat Propaganda Partai Komunis Indonesia 1959-1965" yang disusun oleh Akbar Ridwan (NIM 13030114140084) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Propgram Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Kamis, 14 Februari 2019.

Ketua,

Prof. Dr. Dewi Yuliati, M.A.
NIP 19540725 198603 2 001

Anggota I,

Drs. Sugiyarto, M.Hum.
NIP 19550807 198903 1 002

Anggota II,

Dr. Endang Susilowati, M.A.
NIP 19590516 198811 2 001

Anggota III,

Dr. Agustinus Supriyono, M.A.
NIP 19550315 198703 1 001

Mengesahkan,
Dekan

Dr. Numayati, M.Hum.
NIP 19661004 199001 2 001

KATA PENGANTAR

Setiap generasi menulis sejarahnya sendiri dan saya bersyukur bisa menjadi salah satu orang yang menulis sejarah di generasi saya dengan *zeitgeist* yang berlaku. Segala proses yang saya lalui sudah barang tentu seiring dengan kuasa Tuhan karena tanpa pertolongan dan kehendak-Nya, saya hanya manusia yang tidak tahu arah. Kekuatan yang tidak kasatmata itu semakin saya rasakan berkat dua manusia yang selalu memberikan doa kepada saya sekalipun tanpa diminta, dua manusia yang paling saya sayang: Umi dan Abi.

Skripsi dengan judul "*Harian Rakjat*: Alat Propaganda Partai Komunis Indonesia 1959-1965" yang sedianya sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, saya selesaikan dengan beberapa rintangan. Setidaknya sudah ada tiga judul sebelum akhirnya saya dapat menulis sejarah *Harian Rakjat* sebagai alat propaganda Partai Komunis Indonesia. Pada mulanya, saya hendak menulis sejarah malapetaka 1965 mengenai kehidupan Tahanan Politik Kelas C di Semarang sesudah dibebaskan. Penelitian itu kemudian mendapatkan kendala lantaran mental saya yang belum cukup kuat mendengar kisah mereka.

Ketertarikan saya dengan sejarah literasi Indonesia pada gilirannya membuat saya memilih sejarah pers sebagai topik penelitian berikutnya. Hal itu kemudian mengingatkan saya kepada Minke yang baru saya kenal menjelang akhir 2012. Penelitian yang hendak saya lakukan kemudian terkendala karena di waktu yang bersamaan, sejarah Minke dan *Medan Prijaji* sedang ditulis. Kabar yang saya dapatkan dari Prof. Dr. Dewi Yuliati, M.A itu bagi saya bukan kabar buruk, melainkan kabar baik terlebih penelitinya adalah kakak tingkat saya di Departemen Sejarah. Hal selanjutnya yang saya lalukan adalah menulis proposal skripsi dengan judul *Radikalisme Kiri Pers Bumiputera 1906-1926*, tetapi proposal skripsi tersebut tidak saya ajukan karena kesadaran keterbatasan sumber. Proposal itu kemudian saya berikan ke salah satu mahasiswa angkatan 2016 yang berkelakar ingin melihat contoh proposal skripsi demi memenuhi tugas kuliahnya. Entah dia memang ingin

menjadikan sebagai contoh atau mengganti nama saya dengan namanya, saya tidak tahu.

Peristiwa di Blora sebelum pertengahan tahun 2018 bagi saya adalah peristiwa penting. Perbincangan dengan Bapak Soesilo Toer di kediamannya mengenai sejarah kelam Indonesia akhirnya membuat saya tergerak untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai apa yang terjadi sebelum 1 Oktober 1965. Perenungan yang saya lakukan kemudian membulatkan tekad saya untuk meneliti *Harian Rakjat* dan hasilnya seperti yang sedang ada di tangan pembaca saat ini.

Penelitian yang saya lakukan sudah tentu dapat selesai berkat pertolongan dari beberapa orang. Pada kesempatan ini, saya ingin berterimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Umi, Abi, Aa, dan Adik yang sudah mendukung saya selama kuliah.
2. Dr. Nurhayati, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M.Hum., selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang berkenan memberikan izin dan kemudahan bagi saya dalam penulisan skripsi ini.
3. Dra. Sri Indrahti, M.Hum., selaku dosen wali yang telah memperhatikan perkembangan akademik saya selama kuliah.
4. Drs. Sugiyarto, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bekal keilmuan, diskusi, dan bimbingan selama saya menulis skripsi ini.
5. Prof. Dr. Dewi Yuliati, M.A., Dr. Endang Susilowati, M.A., dan Dr. Agustinus Supriyono, M.A., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun bagi skripsi ini.
6. Segenap staf Arsip Nasional Republik Indonesia yang sudah membantu saya dalam mengakses arsip. Para staf Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, khususnya bagian mikro film yang telah membantu saya dalam mengakses koran-koran lama. Penjaga perpustakaan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia yang sudah mengizinkan saya mengakses arsip

Departemen Penerangan Republik Indonesia. Tanpa bantuan dari ketiga lembaga tersebut saya menyadari skripsi ini tidak akan pernah selesai.

7. Segenap dosen Departeman Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro atas ilmu yang telah diberikan, sekaligus yang tidak pernah bosan mengingatkan kami agar selalu membaca buku, menulis, dan diskusi.
8. Segenap staf administrasi Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, khususnya Mbak Fatma dan Pak Romli yang telah memberikan pelayanan dengan maksimal.
9. Teman-teman Sejarah angkatan 2014. Terutama Taufik Hidayah, Azwin al-Asyfihani, Dian Eka S, Faisal Rahman, Nico Aji S, Tomi Jepisa, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu atas kebiasaan membuang waktu bersama dan berbagi keresahan mengenai proses pengerjaan skripsi. Khususnya alm. Galang Pijar Tri Pangestu yang selalu memberikan keceriaan. Bersemayamlah dengan tenang karena kamu sudah menyelesaikan kehidupan fana ini dengan sebaik-baiknya, Lang.
10. *Dimas Volunteer Grup* periode 2015 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi relawan. Himpunan Mahasiswa Sejarah periode 2015 dan 2016, khususnya teman-teman di divisi PSDM serta Kajian dan Aksi Strategis yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengabdi. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro periode 2016, khususnya bidang Sosial dan Politik.
11. Teman-teman di Serikat Rakyat Sastra, Adhi Prabowo, Agus Wibowo, Andre Findy Fajar, Arief Febriyanto, Ayuf Tirtana, Irfa Ulwan, Julius Prabowo, Nico Aji Saputra, Irwan Sigit, Pudi Jaya, dan Yanuar A yang sudah bersama-sama menghidupkan kembali Serikat Rakyat Sastra menjadi suporter dan wadah apresiasi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.
12. Qory Dwiky Sandhika yang setia menjadi teman diskusi filsafat dan sains hingga akhirnya memutuskan untuk membentuk Forum Filsafat dan Sains pada Februari 2016 dan berganti nama menjadi Komunitas Alienasi pada September 2017. Tidak lupa juga kepada Putro Adjie Pratomo, Daniel A

Pangabean, dan Olga S Pratama yang kemudian turut serta menemani kami di Komunitas Alienasi.

13. Fadli Mubarok, Annas Karyadi, Resza Mustafa, Pudi Jaya, dan Irfa Ulwan yang dengan sabar mengajarkan saya mengenai sastra.
14. Ridwan N. Mulyana, Dinar Fitrah M, M Fijar Lazuardi, Farid Fardon, Nugroho M Jati, dan teman-teman lainnya yang selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya.
15. Syaukani Ichsan dan Ais Kahar yang selalu menerima saya dengan terbuka ketika pulang dari kota perantauan. Khususnya Yusuf Hikmah Adrai yang sudah memperkenalkan saya dengan buku pada akhir 2012 yang karena bukunya itu, yakni Tetralogi Pulau Buru, tanpa melebih-lebihkan saya memilih literasi sebagai jalan dan tujuan hidup.
16. Semua para pelaku sejarah yang karena mereka saya belajar bahwa sejarah adalah kehidupan dan kehidupan tidak hanya berkisah tentang kebahagiaan.

Sebagai peneliti, saya menyadari skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekeliruan. Oleh sebab itu, saya mengharapkan saran dan kritik dari pembaca agar dikemudian hari saya dapat lebih baik lagi dalam melakukan penelitian. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan akademik dan dapat menjadi bacaan alternatif dalam historiografi Indonesia, khususnya sejarah pers Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tabik.

Semarang, 24 Januari 2019

Akbar Ridwan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI		ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN		iii
HALAMAN PERSETUJUAN		iv
HALAMAN PENGESAHAN		v
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI		x
DAFTAR SINGKATAN		xi
DAFTAR ISTILAH		xv
DAFTAR GAMBAR		xix
RINGKASAN		xx
SUMMARY		xxi
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
	B. Ruang Lingkup	4
	C. Tujuan Penelitian	5
	D. Tinjauan Pustaka	6
	E. Kerangka Pemikiran	9
	F. Metode Penelitian	12
	G. Sistematika Penulisan	14
BAB II	**PERS PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN**	16
	A. Kehidupan Pers Menjelang Masa Demokrasi Terpimpin	16
	B. Pers Di Bawah Kendali Demokrasi Terpimpin	26
BAB III	**PROFIL *HARIAN RAKJAT***	41
	A. Corong Politik PKI	47
	B. Pendukung Soekarnoisme	59
BAB IV	**PROPAGANDA *HARIAN RAKJAT***	67
	A. Propaganda Politik	67
	1. Pembebasan Irian Barat	67
	2. Konfrontasi Terhadap Malaysia	79
	3. BPS vs PKI	88
	B. Propaganda Ekonomi	96
	1. Propaganda Ekonomi Terpimpin	97
	2. Propaganda Anti Kapitalisme	102
	C. Propaganda Budaya	119
	1. Propaganda Anti Film Asing	119
	2. Propaganda Dalam Bidang Sastra	129
BAB V	**SIMPULAN**	135
DAFTAR PUSTAKA		137

DAFTAR SINGKATAN

AB	: Angkatan Bersenjata
AMPAI	: *American Movie Picture Association of Indonesia*
Ampera	: Amanat Penderitaan Rakyat
AS	: Amerika Serikat
AURI	: Angkatan Udara Republik Indonesia
Baperki	: Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia
Berdikari	: Berdiri di Atas Kaki Sendiri
BPI	: Bank Pembangunan Indonesia
BPS	: Badan Pendukung/Penyebar Sukarnoisme
BTI	: Barisan Tani Indonesia
CC	: *Central Comite*
CCF	: *Congress for Culture Freedom*
CGMI	: Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia
CIA	: *Central Intelligence Agency*
Dekon	: Deklarasi Ekonomi
Djarek	: Djalannya Revolusi Kita
DK	: Dewan Keamanan
DN	: Dewan Nasional
DPA	: Dewan Pertimbangan Agung
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
Dubes	: Duta Besar
Dwikora	: Dwi Komando Rakyat
FN	: Front Nasional
FP	: Front Pemuda
GARDANESIA	: Gerakan Angkata Muda Indonesia
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
Gerwani	: Gerakan Wanita Indonesia
Gestok	: Gerakan Satu Oktober

GM-Sos	: Gerakan Mahasiswa Sosialis
GR	: Gotong Royong
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
HR	: *Harian Rakjat*
HSI	: Himpunan Sarjana Indonesia
ICA	: *International Corporation Administration*
IMF	: *International Monetary Fund*
INPS	: *Indonesian National Press and Publicity Service*
KABM	: Komando Aksi Buruh Minyak
Kalsel	: Kalimantan Selatan
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KMKB	: Komando Militer Kota Besar
Konperda	: Konferensi Daerah
Kontrev	: Kontra Revolusi
KOTI	: Komando Tertinggi
KOTOE	: Komando Tertinggi Operasi Ekonomi
Kotrar	: Komando Operasi Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi
KSAL	: Kepala Staf Angkatan Laut
KSSR	: Konfrensi Sastra dan Seni Revolusioner
KTS	: Keadaan Tertib Sipil
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lesbumi	: Lembanga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia
L T	: Lajnah Tanfidziyah
Lekra	: Lembaga Kebudayaan Rakyat
LKN	: Lembaga Kebudayaan Nasional
Manikebu	: Manifes Kebudayaan
Manipol	: Manifesto Politik
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
Menlu	: Menteri Luar Negeri

MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Murba	: Musyawarat Rakyat Banyak
Nasakom	: Nasionalisme, Agama, dan Komunisme
NEFO	: *The New Emerging Force*
Nekolim	: Neo-Kolonialisme
NU	: Nahdlatul Ulama
NYWF	: *New York World's Fair*
OLDNEFO	: *The Old Establish Force*
PAPFIAS	: Panitia Aksi Pemboikotan Film Amerika Serikat
Partindo	: Partai Indonesia
PB	: Pengurus Besar
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Peperda	: Penguasa Perang Daerah
Perbum	: Persatuan Buruh Minyak
Permesta	: Perjuangan Semesta
Perti	: Persatuan Tarbiyah Islamiyah
PIA	: Pers Biro Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PP	: Pimpinan Pusat
PSII	: Partai Syarikat Islam Indonesia
PSSI	: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia
PWI	: Persatuan Wartawan Indonesia
Resopim	: Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional
RI	: Republik Indonesia
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
RUU	: Rancangan Undang-Undang
Sarbuksi	: Serikat Buruh Kehutanan Indonesia
Sarbupri	: Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia
SBKA	: Serikat Buruh Kereta Api

SBLG	: Serikat Buruh Listrik dan Gas
SBPI	: Serikat Buruh Percetakan Indonesia
Sekjen	: Sekretaris Jendral
SIPK	: Surat Izin Pembagian Kertas
SOB	: *Staat van oorlog en beleg*
SOBSI	: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SPIK	: Surat Izin Pembagian Kertas
SPS	: Serikat Penerbit Surat Kabar
Sulsel	: Sulawesi Selatan
Sumsel	: Sumatera Selatan
Sumut	: Sumatera Utara
Tavip	: Tahun Vivere Pericoloso
Trikora	: Tri Komando Rakyat
USDEK	: Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia
USIS	: *United States Information Service*
USSR	: *Union of Soviet Socialist Republics*
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
UUPBH	: Undang-Undang Penetapan Bagi Hasil
UUPMA	: Undang-Undang Penanaman Modal Asing
WPM	: Wakil Perdana Menteri

DAFTAR ISTILAH[1]

Afiliasi	:	bentuk kerjasama antara dua lembaga pendidikan, biasanya yang satu lebih bersar daripada yang lain, tetapi masing-masing berdiri sendiri
Asian-African solidarity	:	solidaritas bangsa Asia dan Afrika
blok Barat	:	sebutan untuk negara-negara yang berideologi Kapitalisme
blok Timur	:	sebutan untuk negara-negara yang berideologi Komunisme
Central Intelligence Agency	:	badan intelejen Amerika Serikat
confrontation de tous les jours	:	konfrontasi secara terus-menerus
datum	:	data
Dekrit	:	keputusan
demoralisasi	:	penurunan moral
Dollar	:	mata uang resmi Amerika Serikat
ekstern	:	luar
Feodalisme	:	sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan
headline	:	berita utama
Imperialisme	:	sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan lebih besar
individualistis	:	bersifat pribadi
indokrinasi	:	pemberian ajaran secara mendalam (tanpa kritik) atau penggemblengan mengenai suatu paham atau doktrin tertentu dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja

[1]Selain bahasa asing, Daftar Istilah merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan," (https://kbbi.kemdikbud.go.id., dikunjungi pada 30 Januari 2019).

intern	:	dalam
Kapitalisme	:	sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yang modalnya (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan swasta dengan ciri persangian dalam pasar bebas
kelompok Kanan	:	kelompok politik agama dan militer khususnya Angkatan Darat
kelompok Kiri	:	kelompok yang berideologi komunis, sosialis, dan nasionalis
Kolonialisme	:	paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan tujuan memperluas daerah kekuasaan negara itu
kontra-revolusioner	:	bertentangan dengan atau menyimpang dari revolusi
landreform	:	perombakan dan pembangunan kembali sistem pemilikan tanah dan penguasaan atas tanah.
Liberalisme	:	aliran ketatanegaraan dan ekonomi yang menghendaki demokrasi dan kebebasan pribadi untuk berusaha dan berniaga (pemerintah tidak boleh turut campur)
lustrum	:	masa lima tahun
Manifesto Politik	:	pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seseorang atau kelompok terhadap masalah negara
Nasionalisasi	:	perbuatan menjadikan sesuatu, terutama milik asing menjadi milik bangsa atau negara, biasanya diikuti dengan penggantian yang merupakan kompensasi.
Neo-Kolonialisme	:	kolonialisme jenis baru
Non Blok	:	tidak bergabung dalam satu kelompok tertentu (tentang negara, partai politik, dan sebagainya); netral.

oplah	:	jumlah barang cetak yang diedarkan; tiras.
output	:	hasil
pembreidelan pers	:	penutupan atau pencabutan izin terbit pers
pers aliran	:	surat kabar yang mengusuh paha tertentu
pers independen	:	surat kabar yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan partai politik, pemerintah, atau golongan tertentu
Pers Merdeka	:	sebutan untuk pers masa Demokrasi Liberal
pers partai	:	sebutan bagi surat kabar yang didirikan dan dimiliki oleh partai politik
pers pemerintah	:	surat kabar yang mundukung pemerintah
pers perjuangan	:	surat kabar yang terbit pada zaman Hindia Belanda, bercorak nasional dan menyuarakan kepentingan kaum pergerakan
Pers Terpimpin	:	sebutan untuk pers masa Demokrasi Terpimpin
Persbreidel-ordonnantie	:	peraturan pemerintah Hindia Belanda mengenai tindak pidana pers yang diberlakukan sejak 7 September 1931
propagare	:	mengembangkan atau memekarkan
Rapat Pleno	:	rapat anggota komisi yudisial yang merupakan alat kelengkapan komisi yudisial baik untuk mengambil putusan maupun tidak mengambil putusan
Reglement	:	peraturan
rehabilitasi	:	pemulihan
retooling	:	memperlengkapi kembali
Soekarnoisme	:	paham mengenai pemikiran Sukarno

soverenitas	:	suatu yang menyatakan bahwa yang berdaulat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah rakyat
staat van oorlog en beleg	:	keadaan darurat perang
status quo	:	keadaan tetap pada saat tertentu
ton	:	satuan ukuran berat 1.000 kg
USDEK	:	intisari dari manifesto politik Indonesia yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia

DAFTAR GAMBAR

2.1	Foto Rapat Umum Melawan Imperialisme AS	38
3.1	Karikatur Pers Kanan Menyerang Presiden Sukarno	46
3.2	Karikatur UUPBH-UUPA	55
4.1	Karikatur Perjuangan Indonesia dalam Melakukan Perjuangan Pembebasan Irian Barat Melawan Belanda	77
4.2	Karikatur Keberhasilan Indonesia Membebaskan Irian Barat	78
4.3	Karikatur Inggris di Balik Pembentukan Malaysia	81
4.4	Karikatur Amerika Serikat Mendukung Pembentukan Malaysia	84
4.5	Karikatur Tututan Partai Politik Agar Malaysia Dibubarkan	87
4.6	Karikatur Manikebu, BPS, dan Partai Murba Diibaratkan penari striptis dengan kepentingan dinasti ekonomi	93
4.7	Foto Aksi Mengganyang Imperialisme AS di Jakarta	113
4.8	Karikuatur Penolakan Duta Besar AS dan Propaganda Sita Modal AS	117
4.9	Cerita Bersambung Berjudul Bojolali	133

RINGKASAN

Fokus skripsi ini adalah propaganda *Harian Rakjat* (*HR*) selama 1959-1965. Pada penelitian ini permasalahan yang diteliti berkaitan dengan konten dan sifat propaganda *HR*, serta reaksi pemerintah terhadap propaganda *HR*. Ketiga permasalahan itu menjadi landasan untuk menganalisis konten dan sifat propaganda *HR*, serta menjabarkan reaksi pemerintah terhadap propaganda yang dilakukan *HR*. Selama prosesnya, penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan ilmu politik.

Pembahasan awal skripsi ini mengenai transisi pers dari Pers Merdeka menuju Pers Terpimpin. Selama masa transisi yang berlangsung sejak 1957-1963, pers Indonesia mengalami serangkaian pembreidelan yang dilakukan pemerintah. Tindakan itu sebagai dampak dari upaya pemerintah dalam mengontrol pers. Setelah masa transisi, pers Indonesia pada mulanya dapat dikontrol pemerintah, tetapi kondisi tersebut berubah secara drastis karena pada pertengahan 1964 muncul Badan Pendukung/Penyebar Soekarnoisme (BPS) yang dibantu Amerika Serikat. Tujuan didirikannya BPS adalah menjatuhkan Presiden Sukarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan mengatasnamakan Soekarnoisme. Hal itu mengakibatkan konflik antara pers pendukung Presiden Soekarno terhadap pers BPS yang dianggap kontra revolusioner.

Terbentuknya poros Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom) di awal Demokrasi Terpimpin membuat Presiden Sukarno memiliki pendukung tetap. Salah satu pendukung terkuatnya berasal dari golongan komunis yang diwakili oleh PKI. Posisi *HR* sebagai surat kabar milik PKI, membuat *HR* menjadi media propaganda PKI dan secara konsisten mendukung Presiden Sukarno. Dukungan *HR* termanifestasikan dalam bentuk propaganda anti imperialisme, kolonialisme, kapitalisme, dan semua hal yang berkaitan dengan Blok Barat, tidak terkecuali budaya.

Pembahasan selanjutnya adalah inti penelitian mengenai propaganda *HR* yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga tema besar, yaitu politik, ekonomi, dan budaya. Berkenaan dengan politik, pembahasan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu keterlibatan *HR* dalam propaganda Pembebasan Irian Barat, konfrontasi terhadap Malaysia, dan konflik terhadap kelompok BPS. Situasi tersebut berimplikasi dengan adanya propaganda ekonomi yang berisi mengenai penolakan terhadap kapitalisme asing. Selain itu akibat situasi politik Indonesia, *HR* juga melakukan propagada anti kebudayaan negara imperialis (Blok Barat).

SUMMARY

The focus of this study is the propaganda of Harian Rakjat (HR) during 1959-1965. The research propblems are related to the content and characteristic of HR propaganda, as well as the government reaction to HR propaganda. The three problems are the basis for analyzing the content and characteristic of HR propaganda, and outlining the government's reaction to the propaganda carried out by HR. During the process, this study used historical methods with a political science approach.

The first discussion of this study was about the transition of the press from the Pers Merdeka to the Pers Terpimpin. During the transitional period that took place from 1957-1963, the Indonesian press experienced a series of bans that are carried out by the government. The action is a result of the government's efforts to control the press. After the transition period, the Indonesian press is initially managed by the government, but this condition changed drastically because in mid-1964, the Badan Pendukung/Penyebar Soekarnoisme (BPS) emerged assisted by the United States. The aim of establishing BPS is to overthrow President Sukarno and the Indonesian Communist Party (PKI) on behalf of Soekarnoism. This resulted in a conflict between the partisan of President Soekarno's press against the BPS press which is considered counter-revolutionary.

The formation of the nationalist, religious, and communist (Nasakom) that existed at the beginning of Demokrasi Terpimpin that made President Sukarno have permanent partisan. One of the strongest partisan came from the communist group represented by the PKI. The HR position as a newspaper belonging to the PKI, made HR a PKI propaganda media and consistently supported President Sukarno. HR's support is manifested in the form of propaganda against imperialism, colonialism, capitalism and all matters relating to the Western Bloc, including culture.

The next discussion is the point of research about HR propaganda which can generally be divided into three major themes, namely politic, economic, and culture. Regarding politic, the discussion is divided into three parts, namely the involvement of HR in the propaganda of the Liberation of West Irian, confrontation with Malaysia, and conflict with the BPS. This situation has implications for the existence of economic propaganda which contains the rejection of foreign capitalism. Besides that due to the Indonesian political situation, HR also carried out propaganda against the culture of the imperialist country (The Western Bloc).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Pembubaran Konstituante dan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang termaktub dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959[1] memberikan dampak yang signifikan bagi politik Indonesia. Hal itu disebabkan sesudah dekrit dibacakan, orientasi politik Indonesia berubah dari Demokrasi Liberal yang bersifat parlementer[2] menjadi Demokrasi Terpimpin yang bersifat presidensial.[3] Perubahan yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik Indonesia. Selama Demokrasi Liberal (1950-1959) iklim politik Indonesia berlangsung secara tidak stabil. Ketidakstabilan tersebut dapat dilihat dari perubahan kabinet yang terjadi selama enam kali dalam rentang waktu kurang dari tujuh tahun.[4]

Diberlakukannya Demokrasi Terpimpin dan sesudahnya dibentuk poros Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom) tidak dapat dipungkiri merupakan angin segar bagi Partai Komunis Indonesia (PKI), mengingat PKI merupakan partai

---

[1]"Dekrit Presiden RI/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang kembali kepada UUD 1945" (Arsip Pidato Presiden RI Soekarno 1958-1967 No. 83, Arsip Nasional Republik Indonesia).

[2]Menurut Peter Harris dan Ben Reilly, sistem parlementer adalah sistem politik di mana lembaga legislatif memiliki sebagai aktor utama baik dalam menyususn undang-undang maupun kekuasaan eksekutif. Selengkanya Muhtar Haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Malang: UB Press, 2015), hlm. 110

[3]Menurut Peter Harris dan Ben Reilly, sistem presidensial adalah pemisahan cabang-cabang eksekutif dan legislatif dengan kekuasaan eksekutif di luar kekuasaan legislatif, yaitu presiden dan kabinetnya. Selengkapnya Haboddin, *Pengantar*, hlm. 95.

[4]Malcolm Caldwell dan Ernst Utrecht, *Sejarah Alternatif Indonesia*, terjemahan Saut Pasaribu (Yogyakarta: Djaman Baroe, 2001), hlm. 196-197.

yang menuntut digantinya Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin.[5] Perubahan politik yang terjadi kemudian mendorong kedekatan Presiden Sukarno dengan PKI. Kedekatan Presiden Sukarno dengan PKI bukan tanpa tujuan. Baik Presiden Sukarno maupun PKI memiliki kepentingan masing-masing. Presiden Sukarno menyadari bahwa hanya PKI yang mampu mengimbangi kekuatan Angkatan Darat (AD). Di sisi lain, PKI sadar bahwa dengan berada di lingkaran Presiden Sukarno, mereka merasa lebih mudah untuk melakukan lobi politik yang menguntukan partai, seperti upaya pembentukan Kabinet Gotong Royong.[6]

Keuntungan politik yang didapatkan PKI selama Demokrasi Terpimpin secara otomatis juga memberikan keuntungan bagi organisasi sayap partai, termasuk *Harian Rakjat* (*HR*) yang notabene adalah pers bentukan PKI. Status *HR* sebagai pers partai tentu mengemban tugas melakukan propaganda yang berkaitan dengan kepentingan politik PKI dan organisasi sayap partainya, seperti: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan Barisan Tani Indonesia (BTI). Berkaitan dengan kepentingan politik PKI, selama Demokrasi Terpimpin secara berkala *HR* juga melakukan propaganda yang menguntungkan Presiden Sukarno sebagai bentuk dukungannya.

Aktivitas propaganda *HR* pada dasarnya tidak terlepas dari kondisi pers masa Demokrasi Terpimpin. Pada periode Demokrasi Terpimpin, pers memiliki peranan penting sebagai alat untuk melakukan indoktrinasi Manifesto Politik (Manipol) USDEK.[7] Hal itu semakin jelas sesudah Keadaan Darurat Perang–*staat van oorlog en beleg* (SOB)[8] pada 1 Mei 1963 berganti status menjadi Keadaan Tertib Sipil

---

[5]Geoffrey B. Robinson, *Musim Menjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966*, terjemahan Gatot Triwara (Depok: Komunitas Bambu, 2018), hlm. 54.

[6]Rex Mortimer, *Indonesian Communism Under Sukarno: Ideologi dan Politik 1959-1965*, terjemahan Yudi Santoso (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 75-78.

[7]USDEK adalah akronim dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.

[8]Keadaan Darurat Perang atau *staat van oorlog en beleg* (SOB). SOB pertamakali ditetapkan oleh pemerintah pada 1957.

(KTS)[9]. Sebagai akibat dari pergantian status tersebut, pers diberi tugas sebagai alat kolektif penggerak aksi-aksi massa secara revolusioner dengan jalan memberikan penerangan yang dapat membangkitkan jiwa massa, kehendak massa, dan tindakan massa, yang ditunjukkan untuk melaksanakan Manipol USDEK dan segala ketetapan yang diambil oleh pemerintah.

Pada dasarnya kondisi itu tidak terlepas dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No. II/MPRS/1960 yang menjelaskan bahwa pers berfungsi untuk memperkuat usaha penerangan sebagai media penggerak rakyat dan massa revolusioner.[10] Ketentuan tersebut pada tahap selanjutnya membuat MPRS pada tahun 1963, memutuskan agar pers nasional diberi fasilitas dan bantuan untuk perbaikan mutu, agar dapat benar-benar memenuhi fungsinya sebagai alat revolusi.[11]

Situasi yang membuat pers harus mendukung pemerintah adalah suatu keuntungan bagi *HR* karena dapat dijadikan legitimasi bahwa yang dilakukan *HR* merupakan aktivitas yang dibenarkan oleh pemerintah. Keuntungan lain dengan diharuskannya pers mendukung pemerintah adalah terciptanya situasi di mana *HR* tidak mendapatkan kritikan yang berarti karena kebijakan itu berimplikasi dengan pembreidelan terhadap pers yang tidak sejalan dengan pemerintah. Pembreidelan

---

[9]Penetapan Keadaan Tertip Sipil berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1962 berisikan penurunan tingkatan keadaan darurat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1963.

[10]Penggerak rakyat yang dimaksud adalah menggerakkan masyarakat yang posisinya di luar partai politik atau organisasi maupun simpatisan partai politik. Massa revolusioner adalah kelompok yang memiliki semangat progresif-revolusioner. Kelompok massa revolusioner didominasi oleh golongan nasionalis dan komunis. Secara langsung, kelompok ini berada dalam naungan partai politik atau organisasi sayap partai. Contohnya: kader PKI, PNI, LKN, dan SOBSI. Secara tidak langsung, kelompok ini merupakan simpatisan atau memiliki kedekatan secara ideologis. Lekra masuk ke dalam unsur massa revolusioner secara tidak langsung.

[11]I. Taufik, *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia* (Jakarta: Trinity Press, 1977), hlm. 72-73.

tersebut mengakibatkan *HR* menjadi leluasa dalam melakukan propaganda-propagandanya.

Berdasarkan latar berlakang yang sudah dijelaskan, terdapat permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut. Permasalahan tersebut adalah tentang propaganda yang dilakukan oleh surat kabar *HR*. Permasalahan itu kemudian dirumuskan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja konten propaganda *HR*?
2. Bagaimana sifat propaganda *HR*?
3. Bagaimana reaksi pemerintah terhadap propaganda *HR*?

B. Ruang Lingkup

Dalam melakukan penelitian sejarah, pembatasan spasial dan temporal sangat penting. Perangkat pembatas spasial dan temporal adalah mutlak bagi penelitian sejarah, karena dengan batas tersebut sejarawan akan terhindar dari perihal yang tidak ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.[12] Selain hal itu, pembatasan ruang lingkup ini dimaksud agar pembahasan lebih praktis dan mempunyai kemungkinan untuk dikaji secara empiris serta dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.[13]

Berdasarkan yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dibatasi oleh ruang lingkup spasial, temporal, dan keilmuan. Ruang lingkup spasial penelitian ini adalah nasional. Pemilihan lingkup spasial nasional karena *HR* adalah surat kabar nasional. Sekalipun demikian, kalau ada berita-berita lokal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, maka berita itu digunakan untuk memperkuat lingkup menjadi skala nasional. Selanjutnya ruang lingkup temporal penelitian ini adalah selama Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pemilihan 1959 karena pada tahun tersebut menjadi awal berlakunya Demokrasi Terpimpin setelah Presiden Sukarno

---

[12]Taufik Abdullah, Abdurahman Surjomihardjo (*ed*), *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. Xii.

[13]Taufik Abdullah, *Sejarah Lokal Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 10.

membacakan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Alasan lain adalah bahwa selama Demokrasi Terpimpin PKI merupakan partai pendukung pemerintah dan mendapat keuntungan dengan terbentuknya poros Nasakom. Sementara itu 1965 adalah batas akhir karena menjadi tahun terakhir keberlangsungan Demokrasi Terpimpin ditandai dengan kudeta merangkak[14] terhadap Presiden Sukarno setelah gerakan 1 Oktober 1965. Selain itu pada 3 Oktober 1965 merupakan edisi terakhir *HR* karena sesudahnya selain surat kabar milik AD, yakni *Angkatan Bersendjata* dan *Berita Yudha*, semua surat kabar dilarang terbit.

Ruang lingkup ketiga adalah keilmuan. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini ialah sejarah pers yang menggunakan pendekatan ilmu politik. Hal itu diputuskan mengingat tema penelitian ini adalah sejarah pers dan dalam pengkajiannya tidak terlepas dari sejarah politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Komunisme sebagai ideologi yang diusung PKI menjadi sebab lain mengapa ilmu politik digunakan, mengingat ideologi politik dapat diartikan sebagai nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan, suatu *weltanschauung*, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang, atas dasar menentukan sikap terhadap kejadian dan masalah-masalah politik yang dihadapi dan memerlukan tingkah-laku politiknya.[15]

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, untuk memaparkan konten propaganda *HR*. Kedua, menganalisis sifat propaganda yang dilakukan surat kabar *HR*. Ketiga, menjelaskan reaksi pemerintah terhadap propaganda *HR*.

---

[14]Istilah kudeta merangkak diperkenalkan oleh Asvi Warman Adam. Mengenai kudeta merangkak, selengkapnya Asvi Warman Adam, *Melawan Lupa, Menepis Stigma Setelah Prahara 1965* (Jakarta: Kompas, 2015), hlm. 23-29.

[15]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 32.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berjudul "*Harian Rakjat*: Alat Propaganda Partai Komunis Indonesia 1959-1965" menggunakan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan dan memiliki relevansi dengan penelitian ini sebagai rujukan pustaka.

Buku pertama adalah *Pers dan Dinamika Politik Analisis Media Komunikasi Politik Indonesia*[16] yang ditulis oleh Prof. Dr. Anwar Arifin. Di buku tersebut Anwar Arifin menjelaskan secara komprehensif tentang keterlibatan pers dalam dunia politik. Menurut Anwar Arifin, sistem politik pada suatu negara menentukan corak kehidupan pers di negara itu. Hal tersebut disebabkan pers selalu mengambil bentuk dan struktur-struktur sosial politik di mana pers itu beroperasi. Anwar Arifin kemudian membuktikan keterlibatan pers dan politik berdasarkan Keputusan Dewan Pers tentang Pendoman Pembinaan Idiil Pers yang menjelaskan bahwa perkembangan pers senantiasa akan dipengaruhi oleh struktur sosial dan struktur politik yang berlaku dalam masyarakat tempat pers itu bekerja. Keterlibatan pers dan politik kemudian membuat Anwar Arifin memberikan penjelasan tentang klasifikasi pers, yaitu pers partai, pers afiliasi, dan pers independen.

Revelansi dengan karya Anwar Arifin berkaitan dengan tema, yaitu tentang pers dan politik. Bahwa dalam kajiannya, penelitian ini tidak terlepas dari sejarah pers dan politik Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Sekalipun terdapay kesamaan tema, isi penelitian ini lebih dikhususkan kepada salah satu pers, dalam hal ini adalah *HR* dan dari sudut pandang politik berkaitan dengan aktivitas propagandanya selama Demokrasi Terpimpin.

Buku kedua yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka adalah *Pemerintah, Media, dan Masyarakat di Indonesia*[17] yang ditulis oleh Erman Anom, Ph.D. Buku ini secara umum menjelaskan tentang korelasi antara pemerintah, media, dan

---

[16]Anwar Arifin, *Pers dan Dinamika Politik Analisis Media Komunikasi Politik Indonesia* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010).

[17]Erman Anom, *Pemerintah, Media, dan Masyarakat di Indonesia* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016).

masyarakat. Buku tersebut pada bab awal membahas tentang regulasi dan sistem media di Indonesia yang diawali dari era Pemerintahan Belanda, Pendudukan Jepang, pergerakan kaum nasionalis, era Presiden Sukarno, era Soeharto, dan reformasi. Khusus pada era Presiden Sukarno, Erman Anom menjelaskan bahwa pada masa pemerintahannya, Presiden Sukarno dikenal dekat dengan media. Seiring dengan perubahan politik, interaksi yang semula baik kemudian berbalik, media mulai mengkritik Presiden Sukarno dan pemerintahannya.

Berdasarkan hal tersebut, Presiden Sukarno kemudian memutuskan untuk mengontrol media. Erman Anom kemudian menjelaskan cara Presiden Sukarno dalam mengontrol media dengan mengharuskan semua pers harus memiliki Surat Izin Pembagian Kertas (SIPK) pada 1960 yang diatur oleh Kementerian Penerangan RI. Melalui SIPK, Presiden Sukarno berhasil mengontrol media, pasalnya bagi media yang memberikan kritik kepada Presiden Sukarno atau pemerintah, surat izin tersebut bisa dicabut dan media tidak akan mendapatkan subsidi kertas mengingat pada masa itu kertas untuk koran peredarannya terbatas dan harganya mahal.

Relevansi penelitian yang akan dilakukan dengan buku karya Erman Anom adalah berkaitan dengan tema penelitian, yakni pers dan politik, khususnya pers pada masa Demokrasi Terpimpin.

Buku ketiga karya I. Taufik yang berjudul *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*.[18] Dalam buku ini, I. Taufik menjabarkan sejarah pers di Indonesia mulai dari zaman Belanda, pendudukan Jepang, revolusi fisik, sampai dengan pers Indonesia pada masa Orde Baru. Khusus pada masa Demokrasi Terpimpin, I. Taufik menjelaskan bahwa sistem dan fungsi pers pada Demokrasi Terpimpin dapat dikatakan menganut sistem yang otoriter. Hal tersebut karena pers dijadikan pemerintah sebagai penghubung pemerintah kepada masyarakat dan mengagung-agungkan Presiden Sukarno. Di sisi lain, I. Taufik menjabarkan bahwa pada Demokrasi Terpimin terdapat tekanan pada pers dalam tugas-tugas pers yang

[18]I. Taufik, *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia* (Jakarta: PT. Triyinco, 1977).

berkaitan dengan aksi massa, sehingga menjadikan pers seakan-akan alat pendidik massa untuk menegakkan Demokrasi Terpimpin.

Buku keempat adalah karya Edward C. Smith yang berjudul *Sejarah Pembreidelan Pers di Indonesia*.[19] Buku ini di awal menjelaskan mengenai kondisi Indonesia secara umum. Pembahasan selanjutnya dalam buku ini ialah mengenai perkembangan pers di Indonesia dari zaman Belanda sampai Demokrasi Terpimpin. Edward C. Smith menjelaskan secara konfrehensif mengenai pembreidelan pers di Indonesia, khususnya masa sebelum dan sesudah Demokrasi Terpimpin. Mengenai pembreidelan pers, buku ini menjelaskan bahwa pembreidelan dilakukan pemerintah berdasarkan kepentingan politik di mana pemerintah menginginkan pers berada dalam satu poros yang sama. Hal itu mengakibatkan pers yang mengkritik pemerintah mengalami pembreidelan. Buku ini juga menjelaskan bagaimana Presiden Sukarno mengeluarkan kebijakan untuk mengontor pers. Kebijakan tersebut mengakibatkan pers menjadi terikat dengan pemerintah apabila ingin tetap beredar.

Relevansi dengan penelitian ini adalah memiliki kesamaan tema, yaitu sejarah pers dan dalam periodisasinya selama keberlangsungan Demokrasi Terpimpin. Sekalipun terdapat kesamaan tema, penelitian ini lebih fokus pada surat kabar *HR* dan propaganda yang dilakukannya.

Buku terakhir yang dijadikan tinjauan pustaka adalah *Lekra Tak Membarkan Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965* karya Rhoma Dwi Aria Yulianti dan Muhidin M. Dahlan.[20] Buku ini berisi esai-esai sejarah tentang keterlibatan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dalam kebudayaan Indonesia yang secara umum dimuat oleh *HR*. Kumpulan esai tersebut dibagi menjadi sepuluh bagian, yaitu mukadimah, riwayat *Harian Rakjat*, sastra, film, senirupa, seni pertunjukan, seni tari, musik, buku, dan khotimah.

---

[19]Edward Cecil Smith, *Sejarah Pembreidelan Pers di Indonesia*, terjemahan Atmakusumah, *et.al*. (Jakarta: Grafiti Press, 1983).

[20]Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan, *Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965* (Yogyakarta: Merakasumba, 2008).

Relevansi penelitian ini dengan buku tersebut adalah terdapat kesamaan objek penelitian, yaitu *HR* dan periodisasi yang tidak jauh berbeda karena penelitian ini berlangsung selama 1959-1965. Perbedaan dengan buku tersebut ialah bahwa penelitian ini fokus pada propaganda *HR* yang dibagi menjadi tiga tema besar, yaitu politik, ekonomi, dan budaya. Sedangankan buku karya Rhoma dan Muhidin fokus pada keterlibatan Lekra dalam kebudayaan Indonesia yang dominannya dimuat oleh *HR*. Walaupun demikian, aktivitas Lekra yang dipublikasi *HR* dalam penelitian ini dianalisis sebagai propaganda.

E. Kerangka Pemikiran

Rekonstruksi suatu peristiwa sejarah membutuhkan pendekatan ilmu-ilmu lain agar penelitian yang dilakukan lebih komprehensif dan tetap fokus pada permasalahan penelitian yang sedang dilakukan. Ilmu-ilmu bantu lain yang digunakan juga harus relevan dengan subjek penelitian. Pendekatan yang relevan diperlukan untuk mempermudah usaha dalam mendekati realitas masa lampau dalam penelitian sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan multidimesional.[21] Pada penelitian ini fokus utamanya adalah penelitian sejarah yang menggunakan disiplin ilmu lain, yakni ilmu politik. Pada penelitian ini ilmu politik digunakan untuk mengkaji kepentingan politik PKI dan Presiden Sukarno selama Demokrasi Terpimpin. Hal itu perlu dilakukan karena kepentingan politik PKI dan Presiden Sukarno menjadi unsur yang menentukan propaganda *HR*.

Penelitian ini memiliki tiga konsep dasar, yakni pers, *HR* sebagai pers partai, dan propaganda. Pers dapat diartikan berbagai macam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pers diartikan sebagai usaha percetakan dan penerbitan, usaha pengumpulan dan penyiaran berita, penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio, orang yang bergerak dalam penyiaran berita, dan medium penyiaran

[21]Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi: Suatu Alterntif* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 40.

berita, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film.[22] Selain itu pers juga dapat dibedakan ke dalam dua pengertian yaitu pers dalam arti yang luas dan pers dalam arti yang sempit. Dalam arti yang luas, perkataan pers termasuk semua barang cetak yang ditujukan kepada umum atau khalayak seperti surat kabar, majalah, brosur, bulletin, buku, pamflet, selebaran dan spanduk. Sebaliknya pers dalam arti sempit sama dengan surat kabar, yaitu lembaran-lembaran tercetak yang isinya bersifat umum dan aktual, serta terbit secara teratur (misal setiap hari, setiap minggu, atau sekali dua minggu). Hal itu membuat surat kabar memiliki sifat publisitas (penyebaran kepada khalayak), periodisitas (terbit teratur dan berkala), universalitas (isinya beraneka ragam), dan aktualitas (isinya baru terjadi atau kejadian baru).[23] Merujuk pada definisi di atas, dalam penelitian ini *HR* merupakan pers yang masuk dalam kategori barang cetak dan terbit secara berkala. Hal itu disebabkan *HR* adalah surat kabar yang terbit setiap hari.

Keterangan *HR* sebagai pers tidak dapat diartikan secara umum. Pengertian *HR* sebagai pers dipersempit lagi karena di dalam pers masih terdapat klasifikasi lanjutan. Klasifikasi yang dimaksud kemudian menimbulkan citra pers. Posisi *HR* yang didirikan oleh PKI mengakibatkan *HR* masuk ke dalam kategori pers partai. Hal itu tidak terlepas dari definisi pers partai yang diartikan sebagai surat kabar yang didirikan dan dimiliki partai politik dan dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik itu sendiri.[24] Kondisi itu selanjutnya menyebabkan citra *HR* menjadi pers politik. Menurut A. Muis, pers politik dapat dibagi menjadi dua tipe. Pertama pers sebagai organ partai yang menyerukan ideologi dan politik tertentu. Kedua, pers yang merupakan simpatisan partai atau ideologi tertentu. Berdasarkan dua definisi sebelumnya, *HR* yang notabene organ PKI merupakan pers yang masuk ke dalam kategori pertama. Perlu ditekankan bahwa tujuan pers politik adalah tujuan

---

[22]Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Jaringan," (https://kbbi.kemdikbud.go.id., dikunjungi pada 11 Mei 2018).

[23]Arifin, *Pers*, hlm. 33.

[24]Arifin, *Pers*, hlm. 51.

ideal, bukan mencari keuntungan.[25] Ideal yang dimaksud adalah kondisi yang dikehendaki berdasarkan ideologi dan kepentingan politiknya.

Berbicara propaganda, Muhajir Affandi dalam bukunya *Komunikasi Propaganda Suatu Pengantar,* menjelaskan bahwa kata propaganda berasal dari bahasa Latin moderen: *propagare* yang berarti mengembangkan atau memekarkan. Rangkaian pesan dalam propaganda bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau kelompok orang. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk mempengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya. Selanjutya, disampaikan bahwa propaganda adalah sebuah upaya yang disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan memengaruhi langsung prilaku agar memberikan respons sesuai yang dikehendaki oleh pelaku propaganda. Masih di buku yang sama, Muhajir Affandi juga menjabarkan propaganda menurut Bruce L Smith (*Encyclopedia Social Science*) yang menyebutkan bahwa propaganda adalah manipulasi relatif secara sengaja dengan menggunakan simbol (kata-kata, sikap, bendera, atau musik) terhadap pikiran atau tindakan orang lain dengan sasaran terhadap kepercayaan, nilai, dan perilakunya.[26]

Secara khusus penelitian ini menggunakan konsep propaganda politik. Pada umumnya politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu, dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.[27] Berdasarkan definisi tersebut propaganda politik yang dimaksud adalah upaya yang disengaja dan sistematis untuk mempengaruhi masyarakat berdasarkan kepentingan dan tujuan politik pelaku propagandanya.

Merujuk pada keterangan di atas, propaganda-propaganda yang dilakukan oleh *HR* adalah propaganda yang menggunakan kata-kata tertulis, mengingat *HR*

---

[25]Arifin, *Pers*, hlm. 48-50.

[26]Muhajir Affandi, *Komunikasi Propaganda Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 13-14.

[27]Budiardjo, *Dasar-Dasar*, hlm. 8.

adalah surat kabar yang terbit secara harian. Demi memperkuat konsep propaganda politik, Pendekatan interaksionisme simbolis digunakan dengan tujuan untuk menginterpretasikan fenomena politik seperti terwujud dalam kelakuan, tindakan, sikap, interaksi antar pelaku politik dalam arena politik tertentu.[28] Hal itu dilakukan karena propaganda *HR* tidak terlepas dari kondisi politik Demokrasi Terpimpin.

F. Metode Penelitian dan Penggunaan Sumber

Penelitian yang berjudul "*Harian Rakjat*: Alat Propaganda Partai Komunis Indonesia 1959-1965" menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah itu mencangkup empat tahapan, yaitu *heuristik*, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Tahap pertama adalah *heuristik*, yaitu merupakan pengumpulan sumber atau data sejarah, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber sejarah disebut juga data sejarah, dalam bahasa inggris *datum* bentuk tunggal, bentuk jamaknya adalah *data*. Dalam bahasa latin *datum* berarti pemberian yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan kita tulis.[29] Sumber primer adalah sumber yang didapat dari kesaksian seorang saksi dengan mata kepala atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya.[30] Pada penelitian ini sumber primer yang digunakan adalah berita-berita surat kabar *HR* yang berkaitan dengan penelitian yang terbit selama Demokrasi Terpimpin. Sumber primer lainnya adalah dokumen dan arsip pemerintahan yang meliputi arsip Sekretariat Menteri Koordinator Kompartimen Perhubungan dengan Rakyat 1963-1966, Komando Operasi Tertinggi 1963-1967, Pidato Presiden RI Soekarno 1958-1967, Sentral

---

[28]Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1992) ,hlm. 168

[29]Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005), hlm. 95.

[30]Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah,* terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI-Press, 1984), hlm. 35.

Organisasi Buruh Seluruh Indonesia 1950-1965, Dr. H. Ruslan Abdulgani 1950-1976, Departemen Penerangan Republik Indonesia, dan Lambertus Nicodemus Palar 1928-1981. Berkaitan dengan sumber sekunder didapat dari buku-buku ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Tahap kedua adalah kritik sumber. Kritik sumber merupakan langkah kedua dalam penelitian sejarah. Kritik sumber adalah kegiatan menilai dan menguji sumber-sumber sejarah yang diperlukan baik bentuk fisik maupun isinya. Setiap sumber memiliki aspek *ekstern* dan *intern*. Aspek *ekstern* berkaitan dengan persoalan apakah sumber yang ditemukan itu merupakan sumber utama yang diperlukan. Sementara aspek *intern* berkaitan dengan persoalan apakah sumber itu berisi informasi yang diperlukan. Sehubungan dengan itu terdapat dua jenis kritik, yaitu kritik *ekstern* dan kritik *intern*. Kritik *ekstern* adalah kritik untuk menguji tingkat keaslian atau otentisitas suatu sumber, sedangkan kritik *intern* adalah kritik yang dilakukan untuk menguji kebenaran atau kredibilitas informasi yang terkandung dalam sebuah sumber sejarah.[31]

Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu kegiatan menghubung-hubungkan fakta-fakta sejarah yang sudah diperoleh melalui kritik sumber dalam hubungan yang harmonis, yaitu hubungan kronologis dan hubungan sebab akibat. Berbagai fakta sejarah yang lepas satu sama lain harus dirangkai-rangkaikan atau dihubung-hubungkan hingga menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh, sehingga orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang. Itulah sebabnya, subyektivitas penulis sejarah diakui.[32]

Tahap keempat adalah historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi adalah langkah atau tahapan terakhir dalam penelitian sejarah, yaitu kegiatan menyajikan hasil penelitian sejarah menjadi kisah sejarah dalam berbagai

---

[31]G. J. Renier, *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*, terjemahan Muin Umar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1977), hlm. 115.

[32]Kuntowijoyo, *Pengantar*, hlm. 103.

bentuknya (skripsi, tesis, disertasi, buku-buku sejarah dan lain sebagainya).[33] Pada penelitian ini, historiografi berupa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul "*Harian Rakjat*: Alat Propaganda Partai Komunis Indonesia 1959-1965" ini disusun dalam lima bab. Setiap bagian menitikberatkan pada permasalahan tertentu dan antar bab memiliki keterkaitan hubungan satu dengan yang lain. Berdasarkan hal tersebut, disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan penggunaan sumber, dan sistematika penulisan.

Bab II berjudul Pers Pada Masa Demokrasi Terpimpin, menjelaskan tentang kondisi pers Indonesia pada masa transisi dari pers Demokrasi Liberal menuju pers Demokrasi Terpimpin. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pers pada masa Demokrasi Terpimpin.

Bab III berjudul Profil *Harian Rakjat*. Pada bab ini diawali dengan pembahasan tentang sejarah terbentuknya *HR*. Sesudah itu pembahasan selanjutnya mengeni posisi *HR* sebagai pers partai dan pendukung Presiden Sukarno.

Bab IV berjudul Propaganda *Harian Rakjat*. Bab IV adalah inti penelitian. Pada bagian ini propaganda *HR* yang dikaji secara politik dibagi menjadi tiga tema umum, yaitu: politik, ekonomi, dan kebudayaan. Pada bagian propaganda politik berisi penjelasan mengenai keterlibatan *HR* selama pembebasan Irian Barat, konfrontasi terhadap Malaysia, dan konflik dengan Badan Pendukung/Penyebar Soekarnoisme (BPS). Pembahasan propaganda ekonomi menjelasakan mengenai propaganda dalam mendukung kebijakan Ekonomi Terpimpin dan propaganda anti kapitalisme asing, khususnya negara yang tergabung dalam blok Barat. Propaganda ekonomi dalam pembahasan ini adalah akibat dari kondisi politik yang dialami

---

[33]Kuntowijoyo, *Pengantar*, hlm. 104.

Indoneisa. Bagian propaganda kebudayaan menjelaskan tentang penolakan terhadap budaya imperialis yang dianggap merugikan Indonesia.

Bab V merupakan simpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan pada bab I penelitian ini.